



**Tinjauan Yuridis Pemerintahan Nagori Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**  
 BENYAMIN SIBURIAN, Dr. Djoko Sukisno, S.H.,C.N.  
 Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin, 2014 , *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bahar, Saafroedin, (Tim Penyunting), 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Eko, Sutoro, *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa, dalam Soetandyo Wignosubroto dkk, 2005, Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta
- Eko, Sutoro, Titik, Dyah, Suci, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta
- Gie, The Liang, 1982, *Kumpulan Pembahasan terhadap Undang Undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, Supersukses, Yogyakarta
- Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Kartasapoetra, 1986, *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*, Bina Aksara, Jakarta
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1984, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mashab, Mashuri, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung



**Tinjauan Yuridis Pemerintahan Nagori Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**  
 BENYAMIN SIBURIAN, Dr. Djoko Sukisno, S.H.,C.N.  
 Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Saragih, Sortaman, 2008, *Orang Simalungun*, Citama Vigora, Depok

Safitri, Myrna A. dan Luluk Uliyah, 2014, *Adat di tangan Pemerintah Daerah : Panduan penyusunan produk hukum daerah untuk pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat*, Epistema Institute, Jakarta

Simarmata, Rikardo, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Indonesia*, Regional Initiative on Indigenous People's Rights and Development United Nation Development Pogramme, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta

Soemitro, Rochmat, 1983, *Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah Dari Tahun 1945 s/d 1983*, Eresco-Tarate, Jakarta-Bandung

Soepomo, R., 1993, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta

Solekhan, Moch, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang

Sudiyat, Iman, 1985, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Suhartono, 2000, *Politik Lokal*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta

Sukriono, Didik, 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Setara Press, Malang

Sumitro, Ronny Hanityo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Syafrudin, Ateng dan Suprin Na'a, 2010, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Alumni, Bandung



**Tinjauan Yuridis Pemerintahan Nagori Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**  
 BENYAMIN SIBURIAN, Dr. Djoko Sukisno, S.H.,C.N.  
 Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Umar, Husein, 2005, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wignjodipoero, Soerojo, 1989, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Haji Masagung, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)



**Tinjauan Yuridis Pemerintahan Nagori Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun**

**2016 Tentang Nagori dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

BENYAMIN SIBURIAN, Dr. Djoko Sukisno, S.H.,C.N.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagori. (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 13)

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 2 Seri D Nomor 2)

### **Karya Ilmiah**

Abdi, Samsul Bahri, 2016, *Dinamika Pemerintahan Desa Adat Dalam Regulasi Nasional*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Amrullah, M.Karim, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Pemerintahan Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan, Kabu)*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Firmansyah, Nurul, 2016, *Desa Adat atau Desa Administratif : Kontestasi Politik Revisi Perda Nagari*, Esai Workshop New Law, New Villages? Changing Rural Indonesia, KITLV dan Asian Modernities and traditions Research Program, Van Vollenhoven Institute of Leiden University, Norwegian Centre for Human Rights at the University of Oslo, Leiden, Belanda.

Kurniawan, Leo Adi, 2006, *Sistem Pemerintahan Desa Dan Pemerintahan Adat Masyarakat Tengger Pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



**Tinjauan Yuridis Pemerintahan Nagori Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**  
BENYAMIN SIBURIAN, Dr. Djoko Sukisno, S.H.,C.N.  
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Siagian, Thombak A.P., 2008, *Pelaksanaan Fungsi Majana Nagori Dalam Mewujudkan Good Governance*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.